

OPOSISI

Soal PJ Bupati, Kabag Pemerintahan : Tunggu Keputusan dari Kemendagri

Agus Subekti - CIREBON.OPOSISI.CO.ID

Mar 27, 2023 - 12:20



KAB. CIREBON - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum mengeluarkan aturan resmi tentang pemberhentian kepala daerah. Karena itu, ketentuan soal penjabat kepala daerah masih menunggu dari pusat.

"Belum, belum ada aturan kapan kepala daerah berhenti. Selama keputusan dari kemendagri belum ada, kita tidak bisa berandai-andai. Ini sesuatu yang pasti, jadi tunggu saja nanti keputusan dari kemendagri," tandas Yadi Wikarsa, Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Kabag meyakinkan, informasi-informasi yang berkembang saat ini belum memiliki kepastian. Pun demikian, soal penjabat bupati menjadi kewenangan di pusat.

"Terkait masa akhir jabatan bupati ramai disebut sampai Desember 2023 dan

ada yang berpendapat Mei 2024, kita tunggu saja keputusan dari pusat. Pihak kemendagri pasti akan mengeluarkan keputusan," lanjutnya, Senin (27/3/2023).

Ditanya soal DPRD yang mengusulkan nama pejabat bupati, Yadi mengatakan, hasil komunikasi dengan pihak kemendagri memang begitu.

DPRD yang nanti mengusulkan 3 nama pejabat tinggi pratama ke Kemendagri melalui provinsi. Provinsi juga mengusulkan 3 nama.

"Jadi, bisa nama yang sama atau malah berbeda. Bisa saja 6 nama, 3 usulan dari DPRD dan 3 dari provinsi. Keputusan tetap ada di kemendagri. Bisa jadi kemendagri punya nama lain dari pusat atau yang dipilih usulan provinsi maupun dari kabupaten. Tak menutup kemungkinan juga yang dipilih dari unsur TNI/Polri. Pastinya, keputusan nanti tentu sudah didasarkan oleh penilaian dan banyak pertimbangan," jelas dia.

Menyangkut nama-nama yang diusulkan dari daerah untuk pejabat bupati, kabag mengemukakan, sepengetahuannya tidak disebutkan pejabat eselon 2 A atau 2 B.

"Sejauh yang saya pahami dari aturan yang ada selama ini, disebutkan pejabat tinggi pratama," pungkas Yadi.

Mn/As